

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- “Fundamentals of Soviet Law”, Moscow: Foreign Languages Publishing House, tth.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht)*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 1980.
- Attamimi, Hamid, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Pidato Pengukuhan Purnabakti Guru Besar Tetap FHUI, 1993.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Daftar Usulan RUU Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2010-2104 di Lingkungan Pemerintah*, 17 November 2009.
- Badan Pertanahan Nasional, *Dasawarsa Bhumi bhakti Adhiguna*, Jakarta, 29 Februari 1998.
- BPHN Depkumham, *Pedoman Lokakarya Program Legislasi Nasional 2009-2014*, Bandung, 10-12 Juni 2009,
- Budiardjo, Miriam, dan Ibrahim Ambong, (Ed.), *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Cetakan Keempat, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Friedman, Lawrence M., *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton and Company, 1984.
- Gadner, Bryan A., *Black's Law Dictionary: Eighth Edition*, USA: West Publishing Co, 2004.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksananya (Jilid I)*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003.
- , *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001*, Jakarta: Universitas Trisakti, Maret 2002.

- Indrati S., Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan I*, Jakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- J. Valkhof, *E.N.S.I.E. (Earste Nederlandsche Sistematisch Ingerichte Encyclopedie) III*, Amsterdam: 1947.
- J.L.K., Valerine, *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.
- MD., Moh Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LPES, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka, 1988.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznik, *Hukum Responsif*, (diterjemahkan dari *Law and Society in Transition: Towards Responsive Law*, Harper and Row, 1978), Bandung: Nusamedia, 2008.
- , *Law and Society in Transition: Toward and Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), dalam Satya Arinanto, *Politik hukum 2*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Pertama, 2008.
- Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Hukum Agraria*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Nurdin, Iwan, *PPAN: Layu Sebelum Berkembang*, Jakarta: KPA, 2008.
- Nurlinda, Ida, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Pelzer, Karl J., *Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Pound, Roscoe, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara, 1978.
- Prent K Adisubrata, J. Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Latin Indonesia*, Semarang: Yayasan Kanisius, 1960.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.
- Rousseau, *The Social Contract and Discourses*, Everyman Library, 1917.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1985.
- Subekti dan R. Tjiptrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Suhendar, Endang, dan Ifdhal Kasim, *Tanah sebagai Komoditas: Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru*, Jakarta: Elsam, Cet.1, 1996
- Sumardi, Dedi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Susanti, Bivitri, (et.al.), *Bobot Berkurang, Janji Masih Terhutang: Catatan PSHK tentang kualitas legislasi 2006*, Jakarta: PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan) & Konrad Adeneur Stiftung/KAS, 2006.
- Tjondronegoro, Sediono MP., *Sosiologi Agraria*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Tocqueville, Alexis, *Democracy in America*, (Edited by Bruce Frohnen), London: Longmans, Green, and Co, 1889.
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1961.

B. Artikel

- Kelompok Studi Pembaruan Agraria (KSPA), *Usulan Rantap MPR RI tentang Pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil dan Berkelanjutan*, Bandung: 14-16 September 2001.
- Konsorsium Pembaruan Agraria, *Melawan RUU Pengadaan Tanah*, Buletin Dunia Dalam, Edisi XXIII/2010.
- MD., Moh Mahfud, “Konsistensi Materi Muatan Undang-Undang dengan Konstitusi: Antisipasi Konstitusional Review”, makalah disampaikan dalam *Lokakarya Program Legislasi Nasional 2009-2014*, Departemen Hukum dan HAM RI, BPHN, Bandung 10-12 Juni 2009.
- Parlindungan, A.P., *Seminar Bina Desa*, Bandung, 2000

- Ramli, A. M., Permasalahan penyusunan prolegnas 2005-2009: aspek substansi dan relevansi kebutuhan akan hukum (UU), Paparan disampaikan dalam dalam *Lokakarya Program Legisalsi Nasioanal 2009-2014*, Departemen Hukum dan HAM RI, BPHN, Bandung 10-12 Juni 2009.
- Sumantri, Arie Sukanti, *Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia Depok, Rabu 17 September 2003.
- Sumardjono, Maria S.W. "P penghormatan dan Perlindungan terhadap Hak-hak Adat: Menyikapi Hak Ulayat sebagai Pelaksanaan TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam", (2002), Makalah pada seminar tentang *Pengaturan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat*, Pemda Pemprov Sumatera Barat, Padang 28 Agustus 2002.
- , *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2007.
- , *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2008.
- Thaib, Dahlan, *Membangun Kualitas Produk Legislasi Nasional dan Daerah, Proceeding Workshop dan FGD Prolegnas Sebagai Politik Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Baleg DPR RI, 21-22 Mei 2008).
- Wignyosoebroto, Soetandyo, "Program Legislasi Nasional dan Kebutuhan Hukum Rakyat", makalah dipresentasikan dalam *Proceeding Workshop dan Focus Group Discussion Prolegnas Sebagai Politik Pembangunan Nasiona*, Jakarta: Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008.

C. Internet

- "Peran Strategis Departemen Hukum dan HAM dalam Proses Legislasi" (Rabu, 09 Maret 2005) diunduh dari <http://www.bphn.go.id/index.php?action=news&id=38> diakses pada 1 November 2010.
- "Program Legislasi Nasional Dalam Prospek Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", diunduh dari <http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=art+4&f=prolegnas.htm> diakses 1 November 2010.
- Ghufon, Nurul, "*Prolegnas, PR Pertama DPR*," diunduh dari <http://suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=11237#> diakses 27 Oktober 2010

Khopiatuziadah, *Menanti Realisasi Prolegnas Prioritas 2010*, diunduh dari <http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/artikel/336-menanti-realisation-prolegnas-prioritas-2010>, diakses pada 26 Oktober 2010.

Serikat Petani Indonesia, *RUU pertanahan agenda liberalisasi pertanahan* 30 April 2009, diunduh <http://www.spi.or.id/?p=939>, diakses Senin 27 Desember 2010.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, LN No.104 Tahun 1960 TLN No. 2043.

-----, *Undang-Undang tentang Peradilan Landreform*. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 LN. No. 109 Tahun 1964 TLN. No. 2701,

-----, *Undang-Undang Tentang Landas Kontinen Indonesia*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, LN No.1 Tahun 1973 TLN No. 2994.

-----, *Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia* . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, LN No.44 Tahun 1983 TLN No. 2152.

-----, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004* LN No. 206 Tahun 2000. TLN. No.

-----, *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, LN No.136 Tahun 2001 TLN No. 3260.

-----, *Undang-Undang Tentang Sumber Daya Air*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, LN No.32 Tahun 2004 TLN No. 4377.

-----, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004 Nomor 53, TLN No. 4389

-----, *Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, LN. No.104 Tahun.2004 TLN No. 4421

-----, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan* . Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, LN No.154 Tahun 2009 TLN No. 5073.

-----, *Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ,

LN No.33 tahun 2007, TLN No.4700,

-----, *Undang-Undang Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, LN No.68 Tahun 2007 TLN No. 4725.*

-----, *Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, LN No.4 Tahun 2009 TLN No. 4959.*

-----, *Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, 2004*

-----, *Perpres Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegnas.2005.*

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*

-----, *Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, 2000.*

-----, *Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2001*

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Keputusan DPR RI Nomor.01/DPR-RI/III/2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-200, 2005.*

-----, *Keputusan DPR RI Nomor 41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014, 2010*

-----, *Peraturan DPR RI Nomor 01/2009 tentang Tata Tertib, 2009.*